

Pemetaan Konflik Sosial Pasca Pembakaran Kertas Suara di Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Imam Yuliadi¹, Aldi Apriansyah²

¹Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea

E-mail : Imam.yuliadi@uts.ac.id

²Ilmu Pemerintahan, Universitas Teknologi Sumbawa

E-mail : Aldi.apriansyah@uts.ac.id

Abstract. *The simultaneous elections on February 15, 2024 were also marked by various conflicts, one of which was the political conflict in Bima Regency in the 2024 Election in the form of the burning of 102 ballot boxes in 17 polling stations in Parado District. Two issues related to social problems that underlie the burning of 17 polling stations in Parado District. First, the issue of primordialism and ethnocentrism, which considers local sons to be legislative candidates who must be defended to the death in the 2024 election. Second, the issue of money politics, making people restless, and urging a re-election free of money politics. The type of research used in this study is qualitative descriptive research. This study limits itself to social mapping (Social Mapping) to the design of Conflict Resolution after the 2024 Election Riots in Parado District, Bima Regency. This study uses a qualitative method with a qualitative descriptive approach. With 3 stages, namely (1) Tracing Assumptions and Facts of the Event, (2) Social Mapping, and (3) Conflict Resolution Design. This study limits itself to social mapping to the design of post-2024 Election Riot Conflict Resolution in Parado District, Bima Regency. The findings of this study are as follows: 1.) Identification of Social Conflict. The research reveals the existence of horizontal and vertical conflicts triggered by dissatisfaction with election results, weak oversight, and vote manipulation involving local actors, leading to anarchic actions such as the burning of ballot papers. 2.) Main Triggering Factors. The conflict was fueled by political factors (candidate rivalry), economic factors (influence of money politics), and local cultural factors (group-based loyalty). These factors exacerbated the polarization of a socially fragile community. 3.) Conflict Resolution Strategies. Conflict resolution emphasizes an adat-based mediation approach and the strengthening of local democratic institutions to restore public trust in the political process and future elections.*

Keywords : Mapping; Social Conflict; Election 2024; Parado District

Abstrak. *Pemilu serentak 15 Februari 2024 ditandai pula dengan berbagai konflik, salah satunya konflik politik di Kabupaten Bima pada Pemilu 2024 berupa pembakaran 102 kotak suara di 17 TPS di kecamatan Parado. Dua isu terkait permasalahan sosial yang melatarbelakangi insiden pembakaran 17 TPS di Kecamatan Parado. Pertama, isu primordialisme dan etnosentrisme, yang menganggap putra daerah adalah caleg yang harus dibela mati-matian pada pemilu 2024. Kedua, isu money politik, membuat masyarakat resah, dan mendesak untuk dilakukan pemilu ulang bebas money politik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membatasi diri pada pemetaan sosial (Social Mapping) hingga desain Resolusi konflik pasca Kerusuhan Pemilu 2024 di kecamatan parado Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan 3 tahapan, yaitu (1) Penelusuran Asumsi-asumsi dan Fakta-fakta peristiwa, (2) Social Mapping, dan (3) Desain Resolusi Konflik. Penelitian ini membatasi diri pada pemetaan sosial hingga desain Resolusi konflik pasca Kerusuhan Pemilu 2024 di kecamatan Parado Kabupaten Bima. Dari penelitian ini ditemukan hasil sebagai berikut; 1.) Identifikasi Konflik Sosial. Penelitian mengungkapkan adanya konflik horizontal dan vertikal yang dipicu oleh ketidakpuasan hasil pemilu, lemahnya pengawasan, dan manipulasi suara yang melibatkan aktor lokal, sehingga memunculkan tindakan anarkis seperti pembakaran kertas suara. 2.) Faktor Pemicu Utama. Konflik dipicu oleh faktor politik (persaingan kandidat), ekonomi (pengaruh politik uang), serta budaya lokal (loyalitas berbasis kelompok). Faktor-faktor ini memperuncing polarisasi masyarakat yang sudah rapuh secara sosial. 3.)*

Strategi Resolusi Konflik. Penyelesaian konflik menekankan pada pendekatan mediasi berbasis adat serta penguatan kelembagaan demokrasi lokal untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan pemilu di masa depan.

Kata Kunci : *Pemetaan; Konflik Sosial; Pemilu 2024; Kecamatan Parado*

PENDAHULUAN

15 Februari 2024 adalah hari sakral bagi regenerasi kekuasaan di seluruh pelosok Indonesia. Pada tanggal tersebut digelar pemilu serentak, pemilihan Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh pelosok Indonesia. Moment transisi kekuasaan merupakan masa-masa yang rentan dengan konflik. Pemilu serentak 15 Februari 2024 ditandai pula dengan berbagai konflik, dari Tingkat nasional hingga konflik di Tingkat lokal. Salah satu kabupaten yang bergejolak dimasa pemilu 2024 tersebut adalah Kabupaten Bima. Konflik politik di Kabupaten Bima pada Pemilu 2024 berupa pembakaran 102 kotak suara di 17 TPS di kecamatan Parado (Junaidin, 2024).

Salah satu isu yang memicu amarah masa/simpatian adalah isu Money politik yang dilakukan oleh oknum Caleg dari luar daerah (luar kecamatan Parado). Dari isu tersebut didapati 2 isu penting terkait permasalahan sosial yang melatarbelakangi insiden pembakaran 17 TPS di Kecamatan Parado. Pertama, isu primordialisme, yang menganggap putra daerah adalah caleg yang harus dibela mati-matian pada pemilu 2024. Kedua, isu money politik, membuat masyarakat resah, dan mendesak untuk dilakukan pemilu ulang bebas money politik.

Dari hal tersebut kami mengangkat penelitian berjudul "Pemetaan Konflik Sosial Pasca Pembakaran TPS pada Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat" dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih jauh dalam penelitian ini. Pertama, Bagaimana peta konflik sosial yang melatarbelakangi insiden Pembakaran 17 TPS Pemilu 2024 di Kecamatan Parado?. Kedua, Bagaimana potensi Resolusi sosial pasca konflik Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima?. Dengan menggali kronologi peristiwa dari berbagai sudut pandang, akan didapatkan perspektif yang mumpuni untuk melakukan pendekatan terhadap berbagai pihak yang berkonflik. Berikutnya, dengan memanfaatkan peta Sosial (*Social Mapping*) dari hasil penelitian diharapkan mempermudah menemukan Langkah-langkah resolusi konflik sosial.

Dari dua isu yang berkembang, yaitu isu sentimen kedaerahan dan isu money politic, sangat penting dilakukan Social Mapping terhadap konflik pada pemilu serentak 2024 di kecamatan parado, mengingat, semua bentuk resolusi terhadap konflik yang muncul membutuhkan social mapping untuk menjamin berlangsungnya resolusi konflik yang holistic pada masyarakat. Hal ini dibutuhkan sebagai usaha pencegahan dini terhadap dampak lanjutan dari konflik politik yang terjadi. Sehingga potensi konflik yang akan timbul dikemudian hari bisa diantisipasi. Antisipasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, semisal Pengaturan kondisi sosial (Rekayasa Sosial) dengan aturan dan regulasi dari pemerintah atau dengan jalan lain seperti memaksimalkan potensi kearifan lokal dengan rekonstruksi sosial masyarakat dengan memaksimalkan fungsi tokoh adat & tokoh agama setempat. Bentuk modal sosial yang wajib dijaga adalah integrasi sosial dan kehidupan masyarakat yang harmonis (Fatimah et al., 2013). Untuk itu fenomena konflik sosial ini butuh disikapi supaya tidak menggoyahkan sendi-sendi kehidupan sosial serta melemahkan integrasi sosial. Keadaan ini berimplikasi pada ketahanan daerah (Andriyani, 2021). Apabila tidak disikapi dengan serius dan terjadi pembiaran konsekuensinya adalah terjadinya polarisasi. Ini menyebabkan anggota masyarakat yang mungkin mempertahankan pandangan politiknya bermusuhan dengan mereka yang memiliki preferensi politik yang berbeda. Kasus Indonesia menunjukkan bahwa pemilihan umum masih menjadi faktor penting yang memicu polarisasi karena perbedaan pilihan politik (Jati, 2022).

Penggunaan identitas dalam politik memang tidak sepenuhnya negative asalkan mengedepankan moralitas politik tetapi jika hal ini saja hilang yang terjadi selanjutnya adalah sebuah permasalahan seperti hadirnya antagonisme sosial akibat dari permainan identitas untuk

kepentingan elektoral semata (Abadi, 2023). Pada masyarakat Bima dikenal istilah “Angi ndai” yang secara harfiah berarti “saudara kita” yang maknanya semua orang (etnis Bima/Mbojo) merupakan saudara untuk menunjukkan identitas sebagai orang Bima. Diperantauan istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan solidaritas kesukuan. Hal ini bisa dikonstruksi ulang di daerah asal masyarakat Bima, sehingga filosofi Angi N dai tidak hanya digunakan saat di perantauan tapi juga bisa dipupuk di daerah asal di Bima sebagai slogan pemersatu. Mengingat propaganda yang digunakan oleh oknum politik pada pileg di Bima untuk melakukan provokasi massa yang melakukan pembakaran TPS di Kecamatan Parado menggunakan sentiment yang serupa.

Penelitian ini juga bermanfaat menekan praktik money politik di Kabupaten Bima. Edukasi yang tepat dengan memanfaatkan moment kerusuhan pada Pemilu 2024 di kecamatan Parado menjadi hal yang potensial untuk dilakukan. Menjadikan moment konflik pemilu 2024 sebagai edukasi politik bagi elite maupun masyarakat pelaku money politik, bahwa money politik mengakibatkan kerugian tidak hanya dari sisi keamanan, kenyamanan dan keharmonisan masyarakat, tapi juga kerugian materil yang lebih besar bagi elite politik, karena harus mengikuti PSU (Pemungutan Suara Ulang), Dimana PSU berdampak membengkaknya cost politic berkali-kali lipat dari pemilu normal. Dari Potensi Kearifan Lokal diharapkan terkonstruksi model Resolusi Konflik yang tepat pasca Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami lebih dalam dinamika konflik sosial yang muncul pada pemilu serentak 2024 di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima. Konflik yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, tetapi juga dipicu oleh ketegangan sosial yang telah berkembang di tengah masyarakat. Isu primordialisme yang menguatkan kecenderungan untuk mendukung calon legislatif (caleg) berdasarkan identitas lokal tanpa melihat kualitas atau kompetensinya, telah memperburuk polarisasi dalam masyarakat. Disisi lain, praktik money politik yang merajalela memberikan dampak langsung terhadap sistem politik yang sehat dan mengancam integrasi sosial yang telah terjalin dalam masyarakat Bima. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyebab, dampak, serta solusi terhadap konflik sosial yang muncul dari dua isu utama ini.

Urgensi penelitian ini terletak pada potensi dampak jangka panjang yang dapat ditimbulkan oleh konflik tersebut jika tidak dikelola dengan baik. Polaritas politik yang semakin tajam dapat memperburuk keretakan sosial, mengarah pada antagonisme antar kelompok masyarakat, serta merusak tatanan kehidupan sosial yang selama ini telah terjaga. Dalam konteks ini, social mapping berperan penting sebagai alat untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi konflik. Pemetaan konflik ini tidak hanya akan menggali akar penyebab, tetapi juga akan mengidentifikasi kelompok-kelompok yang terlibat, serta relasi antara mereka, guna menciptakan strategi resolusi konflik yang efektif dan sesuai dengan kondisi lokal. Proses ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih holistik terkait bagaimana cara menghadapi perpecahan yang mungkin terjadi, serta menemukan cara-cara yang tepat untuk memulihkan kembali harmoni sosial (Yuliadi, 2019).

Selain itu, penelitian ini memiliki relevansi yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan praktik money politik yang selama ini menjadi masalah kronis dalam pemilu di Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap insiden yang terjadi di Kecamatan Parado, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana money politik mempengaruhi perilaku pemilih dan tokoh-tokoh politik di tingkat lokal (Sumitro et al., 2020). Dengan memperlihatkan dampak negatif dari money politik, baik dari sisi hukum, moralitas, maupun ekonomi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna dalam rangka memperkuat sistem politik yang adil dan transparan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih cerdas dan bijak dalam memilih.

Pada akhirnya, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi pada pembentukan resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang dapat diterapkan secara efektif di Kabupaten Bima. Potensi kekuatan sosial seperti peran tokoh adat, tokoh agama, serta nilai-nilai budaya lokal yang ada di Bima, sebagai solusi alternatif dalam meredam ketegangan politik dan membangun kembali

kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pemanfaatan pendekatan berbasis kearifan lokal diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan lebih sesuai dengan karakteristik masyarakat Bima, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses rekonsiliasi sosial dan memulihkan kestabilan politik pasca pemilu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Poloma, 2004).

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui (Sugiyono, 2011). Penelitian ini berusaha mengkonstruksi model resolusi konflik yang tepat pasca Pemilu 2024 di Kecamatan Parado Kabupaten Bima melalui proses pemetaan Sosial (Social Mapping). Pemetaan sosial adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sosial, jaringan, dan dinamika kekuasaan dalam suatu komunitas. Metode ini memvisualisasikan struktur sosial, menyoroti interaksi antara individu, kelompok, dan organisasi. Pemetaan sosial sangat berguna untuk memahami konteks lokal, menangani konflik, dan memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pembangunan (Burton, 1990).

Penelitian ini membatasi diri pada pemetaan sosial (Social Mapping) hingga desain Resolusi konflik pasca Kerusuhan Pemilu 2024 di kecamatan parado Kabupaten Bima. Penelitian tidak membahas lebih lanjut tentang Implementasi Solusi konflik, Monitoring dan evaluasi, hingga Rekonsiliasi dan hubungan masa depan. Pembatasan tersebut mempertimbangkan keterbatasan waktu penelitian dan keterbatasan SDM. Hal ini mengingat dalam penelitian resolusi konflik idealnya akan berlangsung lama karena berhubungan dengan kegiatan observasi yang membutuhkan waktu lama.

Penelitian ini akan dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu (1) Penelusuran Asumsi-asumsi dan Fakta-fakta peristiwa, (2) Social Mapping, dan (3) Desain Resolusi Konflik. Pertama, Penelusuran asumsi dan Fakta, seperti pada umumnya penelitian dengan tema aktual dan sensitif seperti isu politik, selalu diselimuti oleh cerita-cerita hoax dan berita yang kurang akurat, baik dari aspek motif maupun peristiwanya sendiri sehingga Langkah awal yang dilakukan adalah pemisahan antara asumsi dan fakta dari kronologi kejadiannya. kedua adalah Social Mapping, hal ini diperlukan untuk memastikan aspek apa saja yang mempengaruhi individu maupun kelompok melakukan sesuatu. Ketiga, memastikan desain resolusi konflik seperti apa yang paling tepat untuk dilakukan pasca Pemilu 2024 di Kecamatan Parado.

Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku pembakaran kotak suara, Petugas TPS dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Parado. Lokasi penelitian akan berada di kecamatan Parado Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Populasi atau Universe adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis (Meleong, 2002). Populasi merupakan jumlah tertentu dari individu yang akan diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Kecamatan Parado yang memiliki hak Pilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di kecamatan Parado Kabupaten Bima.

Sampel dalam penelitian ini bukan sesuatu yang mutlak. Artinya sampel yang akan diambil menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan (Slamet, 2006). Dalam penelitian ini sampel berfungsi untuk menggali beragam informasi dan menemukan sejauh mungkin informasi penting. Teknik sampling yang digunakan adalah Snowball Sampling. Dalam teknik snowball yang kami gunakan ditentukan terlebih dahulu sampel utama selanjutnya sampel berkembang seiring berjalannya penelitian. Sampel utama saat ini diambil dari 3 kelompok informan yaitu Pelaku Pembakaran Kotak Suara, Petugas TPS, Camat Parado dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Parado.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan memanfaatkan beberapa media (Hutahaen, 2018), diantaranya: Observasi berupa pengamatan berkala terhadap Pelaku Pembakaran Kotak Suara, Petugas TPS, Camat Parado dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Parado. Wawancara

(Interview) dengan pedoman wawancara dan catatan penelitian. Dokumentasi menggunakan kamera dan Recorder Handphone, serta foto copy dokumen-dokumen pendukung dari pemerintah desa.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam mencapai validitas data. Teknik triangulasi adalah teknik penarikan keabsahan data dengan memanfaatkan penggunaan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan penyelesaian atau sebagai pembandingan terhadap data yang sudah ada. Dimana dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Artinya membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu sumber informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Triangulasi sumber dalam penelitian ini diambil dari dua sumber, antara lain: antara sesama Pelaku Pembakaran TPS dan perbandingan antara perspektif Petugas TPS dan Masyarakat Kecamatan Parado.

HASIL PENELITIAN

1. Pemetaan Konflik di Kecamatan Parado (Pemilu 2024)

a. Identifikasi Aktor Konflik:

Konflik di Kecamatan Parado Merupakan konflik politik. Dalam pusran konflik tersebut terdapat 3 Pihak, yaitu: 1. Elite Politik Peserta Pemilu, 2. Tim Sukses dan Calo Politik, 3. Lembaga Negara Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

1) Elite Politik Peserta Pemilu

Elite Politik pada Kasus Konflik di Kecamatan Parado dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu 1.) kelompok caleg-caleg dari kecamatan parado, dengan 2.) kelompok caleg-caleg dari luar kecamatan Parado. Pembagian ini didasarkan atas isu politik identitas yang berkembang dalam masyarakat selama pemilu 2024 di kecamatan parado.

2) Tim Sukses dan Calo Politik

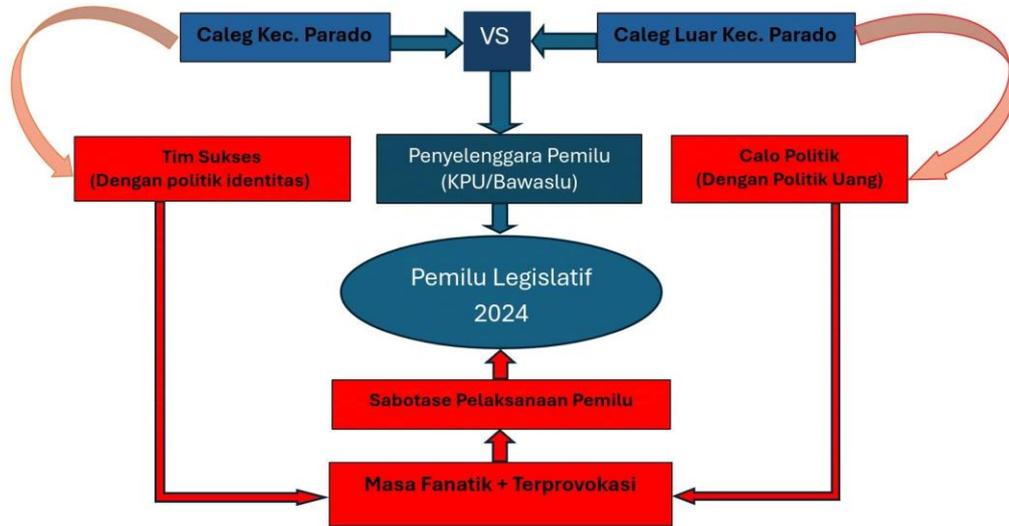
Tim sukses dan calo Politik adalah kelompok berikutnya yang dibagi berdasarkan perannya dalam permainan politik di Kecamatan Parado. Kelompok ini merupakan agen-agen bagi Caleg untuk memperoleh suara dari konstituen. Bisa dikatakan kelompok ini adalah perpanjangan tangan dari elite politik yang maju menjadi caleg pada pemilu 2024 di tingkat kabupaten/ kota di Dapil 1 Kabupaten Bima. Kedua kelompok ini pula bisa dibagi berdasarkan strateginya untuk meraup suara dari konstituennya. Pertama, ada calo politik/tim sukses yang menggunakan Uang sebagai cara untuk memastikan seseorang memilih caleg dukungannya. Kedua, calo politik/tim sukses yang menggunakan isu politik identitas sebagai alat propaganda agar seseorang menjadi pendukung fanatik dari caleg dukungannya.

3) Lembaga Negara Penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu. Tugas utama KPU adalah memastikan seluruh proses pemilu berjalan dengan adil, transparan, dan efisien, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga penghitungan suara. KPU juga berwenang menetapkan daftar pemilih tetap, menyusun jadwal kampanye, dan menyiapkan logistik pemilu. Selain itu, KPU bertanggung jawab mensosialisasikan tata cara pemilu kepada masyarakat agar pemilih dapat menggunakan hak suaranya dengan baik dan sesuai aturan (KPU, 2020).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), di sisi lain, bertugas mengawasi jalannya pemilu untuk mencegah pelanggaran dan memastikan integritas pemilu terjaga. Bawaslu memantau seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara, serta menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Jika terjadi pelanggaran, seperti politik uang atau kecurangan dalam perhitungan suara, Bawaslu berwenang menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan rekomendasi sanksi. Peran Bawaslu sangat penting dalam memastikan pemilu yang bersih dan demokratis.

KPU dan Bawaslu bekerja sama untuk menjaga kualitas demokrasi dalam proses pemilu (KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun, 2018).



(Bagan Hubungan antar Pihak yang terlibat dalam Konflik politik di Kecamatan Parado)

b. Analisis Kepentingan dan Motif Konflik:

Peristiwa pembakaran TPS di Kecamatan Parado adalah konflik politik yang dilatar belakangi oleh politik identitas yang dimainkan oleh elit politik yang ada di kecamatan Parado. pendukung kandidat dari kecamatan Parado berusaha memanfaatkan isu ketidakterwakilan orang Parado di DPRD Kab. Bima untuk meraup suara maksimal di basis pemilihnya.

secara umum dalam konteks konflik pemilu 2024 di kecamatan Parado terdapat 2 kelompok yang memperebutkan suara konstituen. Pertama, kelompok caleg dari Kecamatan Parado. Kedua, Kelompok calon dari Luar Parado. Caleg dari kecamatan Parado cenderung mempertahankan pemilihnya dari politik uang yang digunakan oleh calon dari luar kecamatan Parado. sebaliknya calon dari luar kecamatan Parado berusaha memastikan kemenangannya dengan mencari suara di kecamatan Parado, hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh calo politik untuk memainkan politik uang dengan membayar suara dari pemilih.

Ketika massa pendukung caleg dari kecamatan Parado merasa tidak mampu menang dalam pemilu, masa kemudian memutuskan untuk melakukan pembakaran sejumlah TPS sebelum penghitungan suara selesai dilakukan. Massa pendukung caleg dari Parado berharap pada pemilihan suara ulang mereka dapat menang karena lawan politiknya tidak lagi melakukan politik uang. namun nyatanya pada pemilihan suara ulang praktik politik uang tetap saja terjadi, bahkan dengan nominal yang lebih besar lagi.

c. Isu-Isu Konflik Politik di Kecamatan Parado

1) Isu Primordial

Isu terkait tidak adanya perwakilan dari kecamatan Parado di DPRD Kab. Bima dari Dapil 1 dalam beberapa periode terakhir merupakan isu yang digunakan oleh elite politik lokal (Caleg) dari kecamatan Parado untuk mendapatkan dukungan dari pemilihnya. penggunaan isu identitas sebagai alat kampanye memunculkan kerentanan, akibat fanatisme pendukungnya. politik identitas semacam ini rentan akan konflik politik, karena mengakibatkan pembelahan pada masyarakat, sehingga masyarakat mengidentifikasi diri menjadi In Group dan out Group.

Hal ini diperkuat dengan keterangan dari keterangan semua informan mengeluhkan hal yang sama yaitu buruknya pembangunan di kecamatan parado salah satunya disebabkan oleh tidak adanya perwakilan dari kecamatan parado untuk menyalurkan berbagai aspirasi politiknya, demikian juga dengan keluhan masyarakat parado terkait pembangunan di daerahnya. Politik identitas di kecamatan parado juga mengaburkan isu-isu yang lebih penting, seperti ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Kandidat yang memainkan politik identitas mungkin mengabaikan program kebijakan yang substansial, sehingga pemilu berubah menjadi ajang pertarungan simbolis antar identitas orang parado dan yang bukan orang parado, bukan tentang kompetensi atau visi ke depan.

2) Isu Money Politic / Politik Uang

Dampak politik uang atau money politics sangat merugikan sistem demokrasi dan masyarakat secara keseluruhan. Praktik politik uang yang terjadi di Kecamatan Parado mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Ketika politik uang terjadi, masyarakat parado merasa bahwa proses pemilihan tidak lagi adil dan bersih. Berikut adalah beberapa dampaknya:

Erosi kepercayaan pada demokrasi: Masyarakat Kecamatan Parado cenderung kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi karena merasa suara mereka tidak lagi bernilai. Politik uang tersebut menciptakan persepsi bahwa kemenangan kandidat lebih ditentukan oleh kekuatan finansial daripada pilihan berdasarkan kualitas dan program.

Merasa tidak diwakili: masyarakat setempat meyakini pemimpin yang terpilih melalui politik uang tidak mewakili kepentingan mereka, tetapi lebih melayani pihak-pihak yang membiayai kampanyenya. Ini memicu rasa apatis dan ketidakpuasan di kalangan pemilih di kecamatan parado.

Munculnya kecurigaan terhadap institusi pemilu: Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pemilu, seperti komisi pemilihan umum yang dirasa tidak lagi kredibel dan dianggap tidak mampu mengawasi dan mencegah praktik politik uang. Hal ini diperkuat dari pengakuan informan bahwa baik pada saat pemilihan suara awal (sebelum Pembakaran TPS) maupun pada saat Pemilihan suara Ulang (PSU) praktik politik uang tidak mampu dicegah ataupun diberikan sanksi.

3) Isu Penegakan Hukum (Terkait Indikasi Pembiaran Money Politik)

Isu longgarnya penegakan hukum selama pemilu merupakan efek lanjutan dari maraknya politik uang yang terjadi selama pemilu. Longgarnya pengawasan terhadap pelanggaran dalam proses pemilu berdampak signifikan terhadap ketidakpuasan masyarakat kecamatan parado terhadap hasil pemilu. Beberapa dampak yang ditemukan adalah:

Meningkatnya Ketidakpercayaan pada Proses Pemilu: baik penyelenggara maupun pengawas pemilu dianggap tidak tegas atau gagal mengawasi pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, atau manipulasi data, masyarakat akan mulai meragukan integritas pemilu. Ketidakpercayaan ini dapat meluas dan menciptakan persepsi bahwa hasil pemilu tidak mencerminkan kehendak rakyat.

Meningkatnya Konflik Sosial dan Ketegangan Politik: Longgarnya pengawasan memperburuk polarisasi politik dan meningkatkan ketegangan antara pendukung kandidat dari Kecamatan Parado dan kandidat dari luar parado. Sehingga muncul anggapan bahwa kandidat dari kecamatan parado tidak akan menang, dan memunculkan aksi pembakaran di sejumlah TPS di kecamatan parado.

Kerusakan Citra Lembaga Pemilu: penyelenggara pemilu dianggap tidak dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik, citra lembaga pemilu secara keseluruhan yang rusak ini dapat menurunkan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga-lembaga lainnya yang terlibat dalam proses pemilu, khususnya di Kecamatan Parado.

2. Strategi Resolusi di Kecamatan Parado (Pemilu 2024)

Menghadapi isu konflik politik yang kompleks di Kecamatan Parado, seperti politik identitas, politik uang, dan penegakan hukum, memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa strategi resolusi yang dapat diimplementasikan:

a. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan Literasi Politik: Melaksanakan program pendidikan politik di tingkat komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bersih dan adil. Hal ini termasuk informasi tentang hak suara, cara melaporkan pelanggaran, dan dampak politik uang.

Kampanye Kesadaran: Mengorganisir kampanye kesadaran di media sosial dan dalam komunitas untuk membangkitkan kepedulian terhadap politik uang dan pentingnya memilih berdasarkan program dan kapasitas calon, bukan berdasarkan uang.

b. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas

Pengawasan Pemilu yang Ketat: Meningkatkan peran lembaga independen dalam mengawasi pemilu untuk mencegah praktik politik uang. Pengawasan harus melibatkan masyarakat, seperti pembentukan kelompok pemantau pemilu dari kalangan lokal yang terlatih.

Pelaporan Pelanggaran: Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan kasus politik uang dan pelanggaran pemilu lainnya, yang dilindungi dari intimidasi.

c. Reformasi Hukum dan Kebijakan

Penegakan Hukum yang Tegak: Mengadvokasi perubahan dalam undang-undang untuk memperketat sanksi terhadap praktik politik uang dan pelanggaran pemilu. Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak pandang bulu.

Kebijakan Anti-Korupsi: Mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan anti-korupsi yang ketat, termasuk transparansi dalam penganggaran dan penggunaan dana kampanye.

d. Dialog Multistakeholder

Forum Diskusi Antar Pemangku Kepentingan: Mengadakan forum yang melibatkan pemerintah, calon legislatif, masyarakat sipil, dan masyarakat untuk membahas masalah politik identitas dan politik uang. Dialog ini bertujuan untuk meredakan ketegangan dan membangun pemahaman bersama.

Kolaborasi Antar kelompok: Menggalang kerja sama antar kelompok masyarakat yang berbeda untuk menciptakan narasi bersama yang positif, mengurangi stigma antar identitas, dan mempromosikan persatuan.

e. Pembangunan Ekonomi dan Sosial

Peningkatan Infrastruktur dan Layanan Publik: Fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik di Kecamatan Parado untuk mengurangi keluhan masyarakat terhadap kurangnya perhatian dari pemerintah. Ketika masyarakat melihat kemajuan nyata, kepercayaan mereka terhadap sistem demokrasi dapat meningkat.

Program Pemberdayaan Ekonomi: Membangun program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga mereka tidak terlalu tergantung pada politik uang. Ini termasuk pelatihan keterampilan dan akses ke modal bagi usaha kecil.

f. Mengatasi Masalah Komunikasi dan Media

Pemberdayaan Media Lokal: Mendorong media lokal untuk melaporkan isu-isu dengan adil dan berimbang, serta menyediakan platform bagi suara-suara yang terpinggirkan. Media yang bertanggung jawab dapat membantu mengurangi polarisasi.

Penggunaan Media Sosial: Memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai pemilu dan menyoroti pentingnya keadilan dalam pemilihan.

g. Penyelesaian Konflik melalui Mediasi

Pendekatan Mediasi Profesional: Melibatkan mediator profesional untuk menyelesaikan konflik yang muncul, baik antara calon legislatif maupun antara pendukung. Mediator dapat membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan dan meredakan ketegangan.

Program Rekonsiliasi: Membangun program rekonsiliasi bagi masyarakat yang terdampak konflik, termasuk dialog dan pemulihan hubungan antar individu dan kelompok.

h. Membangun Citra Positif Lembaga Pemilu

Reformasi KPU dan Lembaga Pemilu: Mengadvokasi reformasi dalam lembaga pemilu untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik. Ini mencakup pelatihan untuk petugas pemilu dan sistem akuntabilitas yang lebih baik.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan: Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pemilu, termasuk dalam pengawasan dan evaluasi hasil pemilu, agar mereka merasa memiliki peran dalam menjaga integritas proses pemilihan.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara terpadu, diharapkan konflik politik yang ada di Kecamatan Parado dapat dikelola dengan baik, sehingga menciptakan suasana yang lebih kondusif untuk demokrasi yang sehat dan partisipatif.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, konflik yang terjadi di Kecamatan Parado selama Pemilu 2024 dapat dianalisis dengan pendekatan teori konflik, teori resolusi konflik, dan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Ketiga teori ini memberikan perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami dinamika sosial yang terjadi, baik dari sisi aktor, kepentingan, maupun solusi yang mungkin diambil untuk mengatasi konflik.

1. Teori Konflik

Teori konflik menganggap konflik sebagai bagian tak terhindarkan dalam kehidupan sosial, dan seringkali merupakan hasil dari ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan, sumber daya, atau status sosial. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kecamatan Parado, konflik politik muncul akibat ketimpangan dalam representasi politik, ketidakpuasan terhadap kondisi pembangunan, dan ketidakadilan dalam proses pemilu.

a. Ketidaksetaraan Politik dan Identitas

Konflik antara caleg dari Kecamatan Parado dan luar Parado adalah representasi dari ketidaksetaraan dalam representasi politik. Elite politik lokal yang merasa tidak terwakili dalam DPRD Kabupaten Bima memanfaatkan politik identitas untuk meraup dukungan. Teori konflik, terutama perspektif Karl Marx yang berfokus pada perjuangan kelas dan ketidaksetaraan, dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana kelompok lokal merasa terpinggirkan, sementara calon dari luar Parado berusaha menguasai sumber daya suara di daerah tersebut. Isu primordial yang berkembang memperburuk polarisasi, memicu pembentukan 'in-group' dan 'out-group', dan menciptakan ketegangan antar kelompok (Marx, 1977).

b. Politik Uang sebagai Bentuk Kekuasaan

Praktik politik uang yang terjadi juga mencerminkan ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana politik uang menjadi cara bagi elite untuk mempertahankan kekuasaan dan mendominasi pemilih. Seperti yang dijelaskan oleh C. Wright Mills dalam teori elitisme, kelompok elite yang mengendalikan sumber daya finansial menggunakan praktik ini untuk memastikan kemenangan mereka. Hal ini tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga memperburuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada (Mills, 1956).

2. Teori Resolusi Konflik

Teori resolusi konflik menekankan pentingnya penyelesaian masalah melalui dialog, negosiasi, dan pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini relevan untuk mengatasi konflik yang muncul di Kecamatan Parado, terutama yang disebabkan oleh politik identitas dan politik uang.

a. Pendidikan Politik dan Kesadaran Masyarakat

Menghadapi konflik yang berakar pada ketidakpahaman politik dan praktik politik uang, teori resolusi konflik menekankan pentingnya peningkatan literasi politik di masyarakat. Pendidikan politik dapat mengurangi ketergantungan pada politik uang dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pemilu yang adil dan bersih. Mengikuti pendekatan John Burton tentang “proyek penyelesaian yang berkelanjutan”, pendidikan politik menjadi sarana untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap politik, dan memberikan mereka alat untuk menuntut proses pemilu yang lebih transparan dan bebas dari korupsi (Burton, 1990).

b. Dialog Multistakeholder

Teori resolusi konflik juga menekankan pentingnya dialog antar pemangku kepentingan. Untuk meredakan ketegangan politik identitas dan mengurangi polarisasi, perlu ada forum diskusi yang melibatkan pemerintah, calon legislatif, masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Seperti yang diungkapkan oleh Harold D. Lasswell dalam teori kekuasaan, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang, tetapi tersebar di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam dialog dan perencanaan solusi merupakan langkah penting dalam menyelesaikan konflik (Lasswell, 1936).

3. Teori Strukturasi Giddens

Teori strukturasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens menawarkan perspektif yang berbeda dengan pendekatan deterministik dalam teori konflik. Giddens menekankan bahwa struktur sosial tidak hanya membatasi tetapi juga dibentuk oleh tindakan individu dalam konteks sosial tertentu. Dalam hal ini, konflik yang terjadi di Kecamatan Parado adalah hasil dari interaksi antara struktur sosial (seperti ketimpangan politik, ekonomi, dan kebijakan) dan agen (elite politik, masyarakat, lembaga penyelenggara pemilu).

a. Struktur Sosial dan Praktik Sosial

Berdasarkan teori strukturasi, konflik politik di Kecamatan Parado dapat dipahami sebagai bentuk praktik sosial yang berhubungan erat dengan struktur sosial yang ada. Struktur ketidaksetaraan, baik dalam hal representasi politik maupun ekonomi, menciptakan praktik sosial yang merugikan, seperti politik identitas dan politik uang. Masyarakat dan elite politik saling mempengaruhi dalam membentuk struktur ini, di mana praktik-praktik tersebut kemudian berulang dan memperkuat ketidaksetaraan (Giddens, 2004).

b. Agen dan Struktur dalam Proses Pemilu

Dalam teori Giddens, agen memiliki kapasitas untuk mengubah struktur melalui tindakan mereka. Dalam konteks Pemilu 2024 di Kecamatan Parado, masyarakat dan elite politik berperan sebagai agen yang dapat mengubah struktur yang ada. Meskipun ada struktur yang menghambat proses demokrasi yang sehat, agen (seperti lembaga pemilu, masyarakat sipil, dan calon legislatif) memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Oleh karena itu, reformasi struktural, seperti perbaikan sistem pemilu dan pengawasan yang lebih ketat, dapat membantu menciptakan keseimbangan antara agen dan struktur, yang pada gilirannya dapat mengurangi konflik dan meningkatkan kualitas demokrasi (Giddens, 1984).

Konflik yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh ketidaksetaraan politik dan ekonomi, tetapi juga oleh praktik sosial yang sudah mengakar, seperti politik identitas dan politik uang. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan, baik melalui pendidikan politik, dialog antar pemangku kepentingan,

maupun reformasi struktural, harus memperhatikan interaksi antara agen dan struktur, serta menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi konflik politik yang terjadi di Kecamatan Parado selama Pemilu 2024, yang diakibatkan oleh isu politik identitas dan politik uang. Konflik tersebut melibatkan tiga aktor utama: elite politik peserta pemilu, tim sukses dan calo politik, serta lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu. Elite politik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu caleg lokal dari Kecamatan Parado dan caleg dari luar daerah. Kelompok tim sukses dan calo politik memainkan peran penting dalam memobilisasi suara, baik melalui politik uang maupun politik identitas. Politik identitas yang dikedepankan oleh caleg dari Parado memanfaatkan isu ketidakterwakilan daerah di DPRD Bima, sementara caleg luar Parado lebih sering menggunakan politik uang untuk memenangkan pemilih. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kedua kelompok dan memperburuk polarisasi masyarakat di Parado, yang akhirnya berujung pada peristiwa pembakaran TPS sebelum penghitungan suara selesai.

Penelitian ini juga mengungkapkan dampak politik uang yang sangat merugikan proses demokrasi di Kecamatan Parado. Praktik politik uang tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu, tetapi juga melemahkan integritas lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang memperkuat ketidakpuasan masyarakat, yang merasa bahwa suara mereka tidak dihargai. Konflik politik semakin meningkat ketika pemilih dari kelompok tertentu merasa dipinggirkan atau dimanipulasi oleh praktik politik uang. Untuk mengatasi konflik ini, penelitian merekomendasikan berbagai strategi, seperti pendidikan politik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, reformasi hukum, serta mediasi untuk meredakan ketegangan. Dengan pendekatan yang holistik, penelitian ini menekankan pentingnya perbaikan sistemik dalam pemilu untuk mencegah konflik di masa depan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Berikut hasil yang merupakan temuan dari penelitian ini; *Pertama*, Identifikasi Konflik Sosial. Penelitian ini menemukan bahwa konflik sosial yang terjadi mencakup konflik horizontal antar kelompok masyarakat dan konflik vertikal antara masyarakat dan otoritas. Konflik ini dipicu oleh ketidakpuasan terhadap hasil pemilu, lemahnya pengawasan dalam proses pemilu, serta adanya manipulasi suara yang melibatkan aktor-aktor lokal. Situasi ini kemudian memicu aksi anarkis, termasuk insiden pembakaran kertas suara. *Kedua*, Faktor Pemicu Utama. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi pemicu konflik, yaitu faktor politik yang berkaitan dengan persaingan antar kandidat, faktor ekonomi yang didorong oleh praktik politik uang, dan faktor budaya lokal yang mencerminkan loyalitas berbasis kelompok. Ketiga faktor ini memperburuk polarisasi dalam masyarakat yang sebelumnya sudah rentan secara sosial. *Ketiga*, Strategi Resolusi Konflik. Penyelesaian konflik yang diusulkan dalam penelitian ini meliputi penggunaan pendekatan mediasi berbasis adat, yang mengandalkan nilai-nilai lokal sebagai dasar dialog, serta penguatan kelembagaan demokrasi lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan memastikan stabilitas dalam pelaksanaan pemilu di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum dan Sesudah Pemilu. *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(4), 142–165. <https://journal.kpu.go.id/index.php/TKP/article/view/721>
- Andriyani. (2021). Relasi kuasa elit lokal dan pemerintah lokal dalam penanganan konflik sosial paska Pilkada dalam mendukung ketahanan sosial. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 1(27), 39–64. <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/download/61155/31524>
- Burton, J. W. (1990). *Conflict: Resolution and Prevention*. Macmillan. https://books.google.co.id/books/about/Conflict.html?id=P_gsAQAAIAAJ&redir_esc=y

- Fatimah, M., Rijal, M., Noer, S., Arianto, K., Fitriana, N., Usaha, P., Perdesaan, A., Sugianingsih, S., & Rijal, M. (2013). Studi Tentang Kemunculan Modal Sosial. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 17(2), 65–75. <https://doi.org/10.22146/jkap.6855>
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. University of California Press. http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_constitution_of_society.pdf
- Giddens, A. (2004). The constitution of society: Outline of the theory of structuration: Elements of the theory of structuration. *Practicing History: New Directions in Historical Writing after the Linguistic Turn*, 121–142.
- Harold Dwight Lasswell. (1936). *Politics: Who Gets What, When, How*. Whittlesey House. Whittlesey House. https://books.google.co.id/books/about/Politics_who_Gets_What_When_how.html?id=fP6BAAAMAAJ&redir_esc=y
- Hutahaen, 2015. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D. In *Sistem informasi* (Vol. 2, Issue Cdc, pp. 1–4).
- Jati, W. R. (2022). Polarization of Indonesian Society during 2014-2020: Causes and Its Impacts toward Democracy. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 26(2), 152–167. <https://doi.org/10.22146/jsp.66057>
- Junaidin. (2024). Buntut pembakaran 68 kotak suara, 34 TPS di Bima bakal pemungutan suara ulang. *Kompas.Com*. <https://regional.kompas.com/read/2024/02/22/050000378/buntut-pembakaran-68-kotak-suara-34-tps-di-bima-bakal-pemungutan-suara>
- KEMENPU-PR. SPIP. No 4 Tahun. (2018). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- KPU. (2020). *jdih.kpu.go.id*.
- Marx, K. (1977). *Capital: A Critique of Political Economy, Volume I*. Progress Publisher. <https://oll.libertyfund.org/titles/marx-capital-a-critique-of-political-economy-volume-i-the-process-of-capitalist-production>
- Meleong, L. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosda Karya. [https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode Penelitian Kualitatif.pdf](https://lib.unnes.ac.id/40372/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf)
- Poloma, M. (2004). *Sosiologi Kontemporer*. RajaGrafindo Persada.
- Reissman, L., & Mills, C. W. (1956). The Power Elite. In *American Sociological Review* (Vol. 21, Issue 4, p. 513). <https://doi.org/10.2307/2088727>
- Slamet. (2006). *Yulius Slamet- Metode penelitian sosial*. UNS Press.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. https://digilib.unigres.ac.id/index.php?p=show_detail&id=43
- Sumitro, S., Yuliadi, I., Kurniawansyah, E., & Najamudin, N. (2020). *Reflection The Concept Of Power Foucault 's*. 2529–2534.
- Yuliadi, I. (2019). *Peran Pendidikan dalam Membangun Kesadaran Sosial Masyarakat Bima*. 9(2), 149–154.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII (Bali – Nusa Tenggara) (LLDIKTI-VIII) selaku pemberi dana penelitian Sehingga penelitian ini bisa terlaksana sesuai dengan waktu yang ditetapkan.